REVIU

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK

2015 - 2019

BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbaikan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sehingga keseluruhannya berbunyi seperti tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 JANUARI 2016
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Kata Pengantar

Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 disebutkan bahwa statistik memegang peranan penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalam Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaiman tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden sangat penting diperhatikan. Hal tersebut dituangkan dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015–2019.

Dokumen Reviu Renstra BPS Tahun 2015-2019 ini bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BPS Tahun 2015-2019 yang didasarkan pada pelaksanaan kinerja di Tahun 2015. Kajian pada reviu ini mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap evaluasi atas dokumen perencanaan BPS. Kajian dimaksud menghasilkan penambahan satu (1) indikator kinerja pada sasaran strategis ke-empat (4) pada tujuan ke-dua (2) tanpa merubah sasaran strategis dan tujuan BPS di tahun 2015-2019.

Penambahan indikator tersebut, seluruh jajaran BPS diharapkan lebih mudah mencapai sasaran strategis BPS serta menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai **Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua** dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang ditetapkan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Tahun 2015–2019 maupun reviu ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bemanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Jakarta, Januari 2016
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. SURYAMIN

Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi "**Pelopor data statistik terpercaya untuk semua**". Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis

tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR SINGKATAN xi

BAB 1 - PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum 3
1.2 Potensi dan Permasalahan 6

BAB 2 – VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK
2.1 Visi Badan Pusat Statistik 15
2.2 Misi Badan Pusat Statistik 16
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik 19
2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik 22
2.5 Nilai Nilai Inti BPS 25

BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 31
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis BPS 33
3.3 Kerangka Regulasi 56
3.4 Kerangka Kelembagaan 59

BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja 69
4.2 Kerangka Pendanaan 76

BAB 5 – PENUTUP
5.1 Penutup 81

LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik 87
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi 165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005 -2025..... 31
Gambar 3-2 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA, dan PPAA)..... 40
Gambar 3-3 Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019 16
Tabel 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan 20
Tabel 2-3 Indikator Tujuan dan Target BPS 2015-2019 22
Tabel 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 23
Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi .. 35
Tabel 3-2 Program dan Kegiatan BPS 41
Tabel 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 70
Tabel 4-2 Matriks Pendanaan 77

DAFTAR SINGKATAN

AEC	*ASEAN Economic Community*
ACFTA	*Asean-China Free Trade Area*
BMN	Barang Milik Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BPS-QAF	Badan Pusat Statistik-*Quality Assurance Framework*
Cerdas	*Change and Reform for the Development of Statistics*
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
HDI	*Human Development Index*
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	Indikator Kinerja Program
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
JFU	Jabatan Fungsional Umum
JFT	Jabatan Fungsional Tertentu
K/L	Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LPNK	Lembaga Pemerintah Non Kementerian
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
NSO	*National Statistics Offices*
Program DMPTTL	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPAA	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Program PPIS	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Program PSPA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDG's	*Sustainable Development Goals*
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Sensus Ekonomi
SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA	*System National Account*
SSN	Sistem Statistik Nasional
Statcap Cerdas	*Statistical Capacity Building– Change and Reform for Development of Statistics*
STIS	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
UNSTAT	*United Nations Statistics Division*
WBBM	Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

BADAN PUSAT STATISTIK

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan *performance based budgeting*.

1.1. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMN lima tahun kedua 2009-2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 % pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,6 %. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti *Human Development Index* (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16,7 % di tahun 2009, menjadi 11,96 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,1 % di tahun 2009, menjadi 5,62 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan.

Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya. Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasiskan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS selama periode Renstra 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.

2. Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
3. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi *e-government* untuk kepentingan pengguna data BPS memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti:

1. Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik)
   Sampai dengan bulan September 2014, Pusat Layanan Statistik BPS telah melayani 6.913 layanan permintaan data dari pengguna data.
2. Sistem perpustakaan *online* (*Digilib*)
   Jumlah kunjungan perpustakan *online* terus mengalami peningkatan, hingga September 2014 tercatat 6.876 pengunjung ke portal sistem perpustakaan *online*.
3. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa)
   Pemanfaatan SiRusa sebagai *repository* kegiatan statistik di Indonesia juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2013 kunjungan ke SiRusa tercatat sebanyak 97.768 pengunjung.
4. Sistem katalog mikrodata
   Sistem katalog mikrodata merupakan kumpulan mikrodata di BPS dan informasinya (metadata) yang dikelompokan ke dalam koleksi Statistik Sosial dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS.
5. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan *Website.*
6. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung terciptanya *good governance and clean government* dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut

2. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
3. Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan, yaitu:
   a. Trophy *Bandha Tadya Abiwada* Utama.
   b. Peringkat II Utilisasi BMN.
4. Peringkat III Kepatuhan Pelaporan, BPS sebagai bagian dari Kelompok Terbaik dalam rangka Pelayanan Publik

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Selain menjadi badan penyelenggara statistik, BPS juga mengembangkan SDM di bidang statistik melalui pendidikan jenjang D4 dan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga telah terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawainya maupun statistisi dan pranata komputer dari kementerian atau lembaga lain melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik. STIS berfungsi menghasilkan tenaga statistik professional sedangkan Pusdiklat Statistik berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya.

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya *National Statistics Offices* (NSO) lain, BPS selalu berpedoman kepada *Fundamental Principles of Official Statistics*, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan sistem *official statistics* di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik sosial dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik dari negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Rencana penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* ini menjadikan penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses, serta memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Perkembangan global yang semakin terhubung dan permintaan keterbukaan data serta transparansi yang semakin tinggi mendorong setiap NSO untuk berkolaborasi secara bilateral maupun multilateral. Bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tanggal 31 Desember 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi yang

mengakibatkan aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja berlangsung dengan tanpa hambatan. Konsekuensi dari diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Dalam upaya peningkatan daya saing perekonomian nasional dibutuhkan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistik negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tersedianya keterbandingan data statistik (*statistical data benchmarking*) menunjang Pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang lebih baik. Peningkatan kebutuhan akan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistik negara-negara berkembang lain, serta negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20, mendorong BPS untuk dapat membangun kemitraan strategis dengan NSO/kantor statistik dari negara-negara tersebut.

Peningkatan daya saing ekonomi sejalan dengan terbentuknya MEA pada akhir 2015, berdampak pada peningkatan kebutuhan data statistik yang terpercaya dalam merumuskan kebijakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada bagian lain, Indonesia juga menjadi anggota *Open Working Group* (OWG) on *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, isu dalam OWG dimasukan pada rancangan teknokratis RPJMN 2015-2019 pada lingkungan strategis sisi global yaitu adanya rencana perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Penyusunan Agenda Pasca 2015 dilakukan melalui rangkaian OWG, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 [1] tahun 2012 yang menghasilkan kesepakatan prinsip penjabaran konkrit pelaksanan SDG untuk masuk dalam Agenda Pasca 2015.

SDG's menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat menetukan di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*, *food security* and *nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

---

[1] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019,* 2014, hlm. 38.

1.2.2. Permasalahan

BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhaan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan.

Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter*, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terciptanya sinergi antara unit kerja yang bertanggungjawab terhadap proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam pelaksanaan pengelolaan SDM, masih terdapat tumpang tindih antara kegiatan yang dilakukan satuan kerja Pusdiklat, STIS, dan Biro Kepegawaian.

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik

2.1 Visi Badan Pusat Statistik
2.2 Misi Badan Pusat Statistik
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik
2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

BADAN PUSAT STATISTIK

2.1 Visi BPS

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

2.2 Misi BPS

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

		MISI BPS 2015 -2019
VISI BPS 2015-2019	**Pelopor data statistik terpercaya untuk semua**	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

   Menyediakan data statistik …
   "Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)".

… **berkualitas** …

"Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan ".

… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi …

"Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter* .

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan". (UU no. 16 tahun 1997)".

… dan berstandar internasional…

"Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*".

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan …

"Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)".

… pembinaan dan koordinasi …

"BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

a). Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
b). Pengembangan statistik sebagai ilmu;
c). Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
d). Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
e). Pengembangan sistem informasi statistik;
f). Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
g). Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
h). Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik".

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Membangun insan statistik …

"Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah".

… yang profesional…

"Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas".

… berintegritas …

"Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)".

…amanah…

"Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik".

2.3 Tujuan BPS

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaiman tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerjasama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 2007.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019

		MISI BPS 2015 -2019
VISI BPS 2015-2019	**Pelopor data statistik terpercaya untuk semua**	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
TUJUAN 2019	1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan:

    1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,

    1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:

    2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,

2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

3. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:

   3.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,

   3.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:

   4.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Dalam tujuan kedua ini, terdapat pelaksanaan amanat Undang-Undang Statistik No 16 Tahun 1997 terdapat dalam tujuan kedua ini, hasil kegiatan statistik berupa data dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan.

Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2-3 Tujuan dan Indikator Tujuan BPS 2015-2019

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%
3	Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	150	500	500	500	500
4	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.4 Sasaran Strategis BPS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan

program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan *eksternal*) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan *internal*). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)
	SS3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
	SS6. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS7. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS8. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS9. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: ”Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas”, adalah:

   1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Dengan indikator sasaran:

1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

1.1.4. Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi

1.1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu

1.1.6. Jumlah *release* data statistik yang tepat waktu

1.1.7. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)

Dengan indikator sasaran:

1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga

1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha

1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha

1.3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien

Dengan indikator sasaran:

1.3.1. Jumlah *self assement* aktivitas statistik mandiri yang dihimpun

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: ”Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah:

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Dengan indikator sasaran:

2.1.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS

2.1.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

2.1.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

2.1.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

2.1.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: ” Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”, adalah:

3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

Dengan indikator sasaran:

3.1.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

3.2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

3.2.1. Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada kementerian/lembaga

4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: ”Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah:

4.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Dengan indikator sasaran:

4.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

4.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

4.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan indikator sasaran:

4.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB

4.2.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB

4.2.3. Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)

4.3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Dengan indikator sasaran:

4.3.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**

   Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

   a. Kompeten
      mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
   b. Efektif
      memberikan hasil maksimal,
   c. Efisien
      mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
   d. Inovatif
      selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
   e. Sistemik
      meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. **Integritas**

   Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dedikasi
   memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
b. Disiplin
   melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
c. Konsisten
   selarasnya kata dengan perbuatan,
d. Terbuka
   menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
e. Akuntabel
   bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. **Amanah**

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terpercaya
   melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
b. Jujur
   melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
c. Tulus
   melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
d. Adil
   menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB 3

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

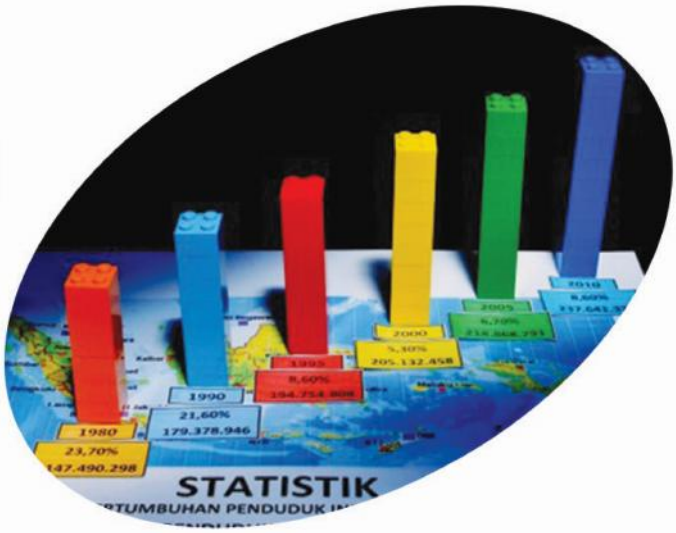

BADAN PUSAT STATISTIK

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Agenda Prioritas

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025[2]

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

[2] Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
2. Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program *Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.
3. Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.
5. Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
7. Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.

8. Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).
9. Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya.

3.1.2. Quickwins dan Program Lanjutan

Quickwins dan program lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Quickwins BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. Quickwins BPS digunakan untuk mendukung quickwins nasional yaitu penyempurnaan data kemiskinan dengan sasaran jumlah penduduk miskin menjadi 10,25% dari 11,25%.

Sedangkan program lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan Publikasi Indeks kesetaraan dan Keadilan Gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana Desa. Sasaran kegiatan ini adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan perspektif gender dengan indikator jumlah publikasi/laporan Indeks Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender per kabupaten yang terbit tepat waktu.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai

tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Tabel.3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)	1. Peningkatan *response rate*	1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
	SS.3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien	1. Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik	1. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik, 2. Mempublikasikan *quality gate* pada masing-masing tahapan kegiatan statistik.
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, *2.* Meningkatkan *Customer Relationship Management,* 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
		2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	1. Meningkatkan kualitas *website* BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai, 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik	1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
		4. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik
T.3. Peningkatan koordinasi kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan	SS.5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	2. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS, 3. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta.
		2. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik	1. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait, 2. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS.
	SS.6. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	1. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS, 2. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.7. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru.
	SS.8. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. 3. Penetapan pelaksanaan zona integritas
	SS.9. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan		1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

3.2.2 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, (iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 3 (tiga) program generik yaitu: Program DMPTTL, Program PSPA dan Program PPAA.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Esselon II di BPS Pusat. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (pusat). Sedangkan untuk Program Generik, pada setiap Satuan Kerja Esselon II BPS Provinsi disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi.

Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan Program Generik yang sama dengan BPS Provinsi.

Prioritas kegiatan BPS dilaksanakan dengan didasarkan kepada:

a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional.

Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 telah ditetapkan sebagai Isu Strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.

Adapun hubungan antar program BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, adalah sebagai berikut.

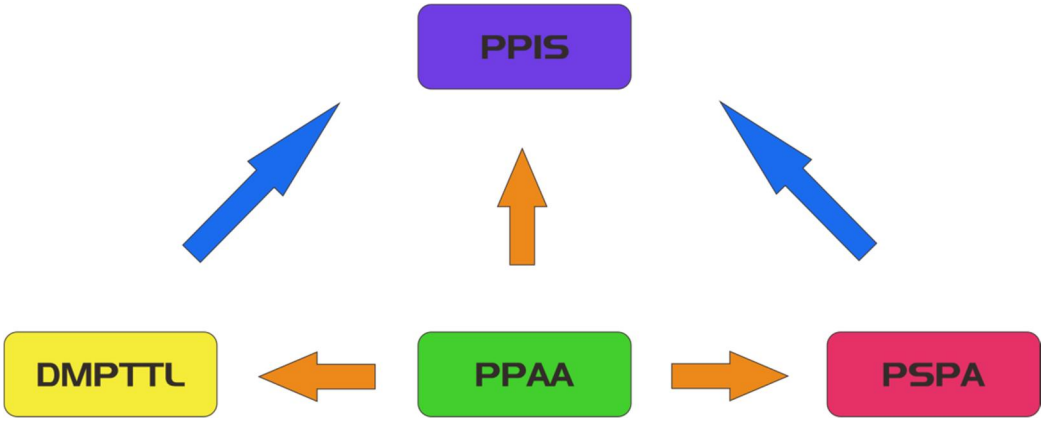

Gambar 3-2 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA, dan PPAA)

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Tabel. 3-2 Program dan Kegiatan BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.	Program PPIS	• Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, • Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik, • Pengembangan Sistem Informasi Statistik, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					• Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, • Pengembangan dan Analisis Statistik.
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)	1. Peningkatan *respons rate*	1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data	Program PPIS	• Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					• Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran.
			2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.	Program DMPTTL	• Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum
	SS.3. Memastikan pengendalian mutu yang efektif dan efisien	1. Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik	1. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis Statistik, 2. Mempublikasikan *quality gate* pada masing-masing tahapan kegiatan statistik.	Program PPIS	• Pengembangan dan Analisis Statistik, • Pengembangan Sistem Informasi Statistik.
T.2. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui	SS.4. Meningkatnya kualitas hubungan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas	1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik	Program PPIS	• Pelayanan dan Pengembangan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	dengan pengguna data (*user engagement*)	penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	2. Meningkatkan Customer Relationship Management		Diseminasi Informasi Statistik
			3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik	Program DMPTTL	• Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum
		2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai 1. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.	Program PPIS	• Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik, • Pengembangan Sistem Informasi Statistik.
		3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS	1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana	Program PSPA	• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik	dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik		Operasional Perkantoran Lainnya.
			2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Program PPAA	• Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I, • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II, • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
		4. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik	Program PPIS	• Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, • Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					• Pengembangan Sistem Informasi Statistik, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, • Pengembangan dan Analisis Statistik.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS.5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS, 2. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta.	Program PPIS	• Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran.
		2. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan	1. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi	Program DMPTTL	• Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik	berbagai regulasi terkait 2. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS.		
			3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana TI dan operasional statistik	Program PSPA	• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran
			4. Meningkatkan pengawasan dan kinerja aparatur BPS	Program PPAA	• Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I, • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II, • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.6. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	1. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS	Program PPIS	• Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran
			2. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di	Program DMPTTL	• Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara, • Penyelenggaraan STIS.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
			K/L maupun swasta		
T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.7. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegaitan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur,	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif	Program DMPTTL	• Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian
			2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur		• Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)
			3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru		• Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.8. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	pengawasan, akuntabilitas kinerja	1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. 3. Penetapan pelaksanaan zona integritas	Program PPAA	• Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I, • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II, • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.9. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan		1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Program DMPTTL	• Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran, • Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.

2

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
   a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi;
   b. Pengembangan dan Analisis Statistik;
   c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
   d. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
   e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
   f. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
   g. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
   h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
   i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
   j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
   k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
   l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
   m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
   n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
   o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
   p. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
   a. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
   b. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
   c. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
   d. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
   e. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
   f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi;
   g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS); dan
   h. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
   a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya; dan

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA), dengan kegiatan:
   a. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
   b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
   c. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

3.3. Kerangka Regulasi

Secara umum regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi mengenai struktur organisasi BPS utamanya adalah untuk mendukung penyelenggaran statistik sebagai amanat UU.

BPS memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat.

Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok:

(1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS
   a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.
   b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
   c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
   d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
   e. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPSdi Daerah

f. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
g. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
h. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
i. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS
j. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
k. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.

a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

   Intisari dari regulasi:
   - Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,
   - Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

   Intisari dari regulasi:
   - Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan stastistik dasar, sektoral, dan khusus,
   - Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
   - Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,
   - Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah

   Intisari dari regulasi:
   - Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
   - Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral

Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang ini yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dari perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut:

1. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997

   Pasal ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.

2. Pasal 27 UU No. 16 Tahun 1997

   Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda,yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan.

   Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kurangnya sosialisasi undang-undang ini merupakan salah satu penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Di sisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut.

Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan dengan instansi lain, yakni: Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi; Keppres No. 86 tahun 2007 menjelaskan tentang peran BPS, namun peran dari stakeholder lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah, belum tertuang secara eksplisit.

Dari uraian di atas, penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan dasar BPS untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 2015-2019. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BPS dalam amandemen UU statistik adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan,
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik

4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis
5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis
6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru
7. Melakukan uji publik terhadap RUU Statistik
8. Penyempurnaan terhadap RUU Statistik
9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pesatnya perkembangan teknologi, tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan data yang relevan dan *up to date*, serta meningkatnya permintaan keterbandingan data secara internasional, mengisyaratkan bahwa BPS harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu, serta mengacu standar nasional dan internasional, melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM), serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selama kurun waktu 2015-2018, BPS akan melakukan suatu upaya untuk mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap-CERDAS). Tujuan dari program ini adalah dalam rangka pencapaian visi BPS. Pertama, kualitas data harus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Hal ini memerlukan adanya keterpaduan statistik (*statistical integration*) dan dijalankannya *Statistical Quality Assurance Framework* secara konsisten.

Kedua, perlunya membangun arsitektur TIK yang mendukung tercapainya visi BPS melalui: manajemen data yang mendukung keterpaduan statistik, datawarehouse sebagai *enabler* keterpaduan statistik, perbaikan infrastruktur jaringan yang memudahkan pertukaran data antar kantor statistik daerah di seluruh Indonesia, perbaikan dalam hal keamanan data untuk menjamin kerahasiaan termasuk pada saat pertukaran data.

Ketiga, perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penataan sistem manajemen SDM yang lebih baik dan berbasis kepada kompetensi. Hal ini mencakup perencanaan, rekruitmen, pengembangan kompetensi karyawan, manajemen kinerja, manajemen karir hingga penggajian. Selain dari penataan sistem, BPS telah mencanangkan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman bagi karyawan untuk menjalankan perannya secara efektif, yaitu: Profesional, Integritas dan Amanah atau disingkat PIA. Budaya kerja ini harus dijalankan secara konsisten oleh setiap insan BPS sehingga agenda reformasi BPS berjalan seperti yang diharapkan.

Keempat, perlunya pengelolaan kelembagaan untuk mendukung lancarnya program STATCAP-CERDAS mencapai BPS masa depan. Pengelolaan kelembagaan mencakup semua aspek mulai dari perencanaan strategis, Tata Kelola Yang Baik (*Good Public Governance*), peran Inspektorat, analisis beban kerja, sistem pengelolaan dokumen (*Document Management System* - DMS), sistem pendukung pengambilan keputusan (*Decision Support System* - DSS), kerangka aturan hukum yang berlaku, dan penetapan budaya kerja yang diinginkan.

3.4.1 Kebutuhan Meningkatkan Ketata-laksanaan

Strategi yang diterapkan dalam upaya meningkatkan ketatalaksanaan adalah dengan membangun *blue print* Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik (*Statistical Business Framework and Architecture* - SBFA), penguatan infratrusktur, mere-engeneering proses bisnis beberapa survei dengan didukung oleh dan memastikan perubahan yang dilakukan memanfaatan TIK yang optimum, perbaikan dalam menajemen dan pengembangan SDM serta penguatan organisasi.

Rencana strategis dalam meningkatkan ketatalaksanaan yang akan dilakukan tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik (*Statitical Business Framework and Architecture*)
   Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2015. BPS akan membangun kerangka dan arsitektur Bisnis Statistik, yang selanjutnya disebut SBFA, merujuk pada bentuk model proses umum statistik atau GSBPM (*Generic Statistical Business Process Model*). Kebutuhan untuk memproduksi Neraca Nasional menjadi prioritas dalam kerangka pembenahan proses bisnis survei-survei yang ada di BPS. Kerangka pembenahan juga memperhatikan kerangka kebutuhan nfrastruktur statistik korporat untuk mendukung semua proses yang diidentifikasi di dalam model.
   Di dalam SBFA ini dituangkan semua kebutuhan perubahan bisnis yang diperlukan, kerangka infrastruktur statistik, manejemen data dan metadata, kebutuhan sistem-sistem yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang dibangun, kebutuhan penyelarasan organisasi agar mendukung perubahan proses bisnis yang terjadi dan kebutuhan kompetensi SDM untuk menjamin perubahan bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai BPS sesuai yang ditetapkan.

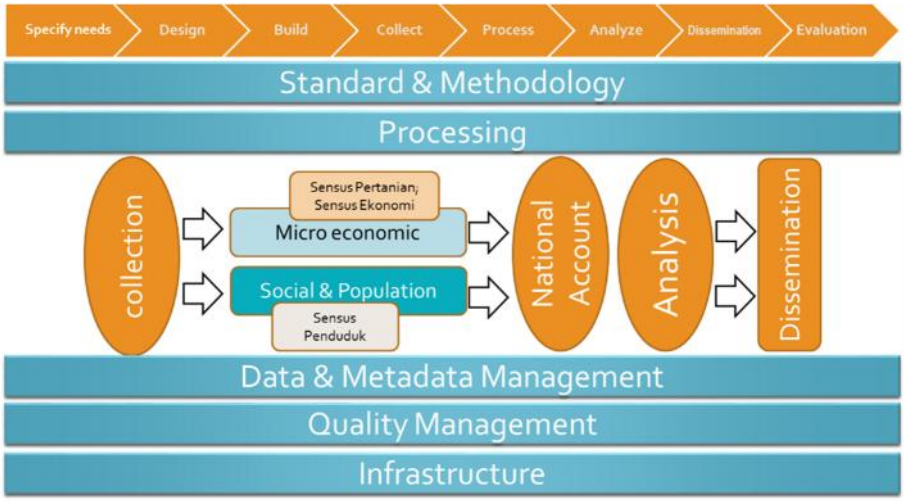

Gambar 3.3. Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik

2. Mendefinisikan, membenahi, membangun, dan mengimplementasikan infrastruktur statistik

   Aktivitas ini dilakukan pada tahun 2015-2016. Dalam prosesnya setelah SBFA ditetapkan, perlu dibuat semua persyaratan yang dibutuhkan untuk membangun infrastuktur statistik BPS yang mendukung penerapan SBFA secara efektif. Persyaratan yang dibuat harus mempertimbangkan:

   a. *Existing infrastructure*: area yang menjadi sasaran dibenahi adalah pengelolaan dan penggunaan *statistical standards*, *area methodology*, *questionnaire design*, *geospatial system*, hubungan BPS dengan pengguna data, komunikasi dengan responden guna meningkatkan respon terhadap survei yang dilakukan, *statistical quality assurance*, dan *central business register.*

   b. *New statistical infrastructure*: pengelolaan tenaga lapangan yang ada di BPS daerah agar terintegrasi dan efisien, merancang kembali data management, membangun *environment* yang sesuai dengan SBFA dalam mengelola berbagai tahapan dalam survei.

3. Mendesain ulang dan mengimplementasikan tata laksana *(business process*):

   Dengan telah ditetapkannya SBFA dan infrastruktur yang sesuai dengan arsitektur tersebut, bisnis proses yang ada di BPS secara bertahap perlu dirancang ulang. Kegiatan ini dilakukan tahun 2016-2017, dengan fokus pembenahan pada beberapa produk lini yaitu Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Hortikulutura dan Perkebunan, Statistik Harga produsen, Statistik Ekspor-Impor, Susenas dan Sakernas, Neraca nasional, Diseminasi dan Metodologi.

   a. National Accounts

Penyusunan neraca nasional yang saat ini sudah mulai menerapkan SNA 2008 membutuhkan suatu system pengolahan yang terintegrasi dengan hasil pengolahan dari data yang dikumpulkan oleh subject matter. Oleh karena itu persyaratan (*requirements*) yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pengolahan ini harus mengacu SBFA dan dalam infrastruktur yang baru dibangun.

Requirements yang dibuat ini harus memfasilitasi majemen kompilasi yang berbasis *time series* dan menyediakan output yang juga berbasis *time series* pula dengan *seasonal adjusted analysis.*

b. *Selected statistical collections/compilations*:

Mereviu dan melakukan *Business Process Re-engineering* (BPR) (mengacu pada SBFA dan infrastruktur statistik) untuk produk lini sedemikian sehingga dapat beroperasi penuh pada environment yang baru. Serta memastikan bahwa hasilnya dapat dibangun system-system baru dan dimplementasikan.

Rancangan yang dibuat harus mempertimbangkan metode dan teknologi baru dalam proses pengumpulan data dan pengolahan serta mengadopsi standar statistik dan rekomendasi internasional.

4. Memastikan linkage dengan komponen TIK, SDM, dan penyelarasan organisasi.

Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2015-2018. Perubahan pada BPS *statistical operations* yang didukung TIK tergantung pada Pengembangan SDM dan Penguatan/Penataan Organisasi. Oleh karena itu perlu perlu dipastikan bahwa ICT *design* and *strategy* selaras dengan SBFA, kemudian perlu dilakukan perubahan budaya, pengembangan training dan perencanaan SDM yang baik sehingga perubahan proses bisnis dan sistem berlangsung dengan baik.

Selain itu perlu memastikan input tentang identifikasi kompetensi (*skill, knowledge,* dan *behaviour*) yang dibutuhkan untuk berbagai jenis pekerjaan dalam bidang statistik, serta memastikan bahwa perlunya penyesuaian organisasi agar memastikan transformasi statistik ini dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

3.4.2. Pengembangan Platform ICT dan Sistem Manajemen Informasi Statistik

Teknologi informasi adalah sebagai pengungkit (*enabler* dalam pengembangan ketata-laksanaan. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di semua aspek kegiatan statistik akan memungkinkan peningkatan kualitas data statistik. Aktivitas ini terbagi ke dalam 2 kelompok besar yaitu menyusun rancangan dan strategi *Information Technology* (*IT Design and Strategy*) serta pengembangan sistem infrastruktur dan aplikasi statistik (*Statistical Infrastructure System and Application Development*). Aktivitas ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2015-2018.

1. *IT Design and Strategy*

   Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan proses tata kelola dan manajemen TI. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah*:*

   a. Penyusunan Strategi TI
      Pada tahap ini Strategi disusun untuk mendukung tujuan bisnis jangka panjang BPS sesuai dengan visi, misi dan roadmap TI BPS. Dalam strategi TI ini juga meliputi BPS TI framework dan trend industri TI.
   b. Tata kelola dan tata laksana TI (*IT management and Governance*)
      IT governance perlu disusun guna menentukan kerangka kerja hak keputusan dan akuntabilitas dalam penggunaan TI di BPS. Selain itu penyusunan IT *management* dipandang perlu untuk membantu BPS dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan terkait TI.
   c. Pembangunan Enterprise Arsitektur (EA)
      BPS akan membangun EA yang sejalan dengan SBFA yang ditetapkan dalam pengembangan ketata-laksanaan BPS di masa depan. EA ini harus menerjemahkan strategi bisnis BPS ke solusi TI dengan biaya yang efisien dan terancang dengan baik berdasarkan analisis kondisi BP saat ini. Selain itu juga dalam EA akan tergambar rancangan kondisi masa depan BPS.
   d. Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Operasi Standar TI
      Penggunaan TI di masa depan harus berdasarkan Operasi standar yang mendukung pengembangan aplikasi.

2. *Statistical infrastructure System and Application Development*

   Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun/mengembangkan sistem infrastruktur statistik dan sistem aplikasi statistik yang sejalan dengan SBFA dan mendukung perubahan proses bisnis yang terjadi. Sistem dan aplikasi yang dibangun antara lain:

   a. *Standard and classification system*;
   b. *Frame Management System*;
   c. *Questionnaire Design Tool*;
   d. *Geospatial System*;
   e. *Statistical Analysis System*;
   f. *Quality Assurance Monitoring System*;
   g. *CBR System*;
   h. *Field Force Management System*;
   i. *Data & Metadata Management Systems*;
   j. *Survey Database and Input Data Warehouse*;
   k. *Dissemination Data Warehouse*; dan
   l. *Statistical Production & Dissemination Systems*.

3.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS dilakukan dengan mengakomodir perubahan dinamika baik internal maupun eksternal melalui penguatan kelembagaan. Beberapa pertimbangan dalam penguatan kelembagaan di antaranya adalah: saat ini struktur organisasi BPS gemuk, tidak efektif, dan efisien, adanya rencana pengembangan proses bisnis dan produk statistik, jadwal kegiatan yang tumpang tindih serta lemahnya UU dan regulasi penunjang kegiatan statistik. Tujuan penguatan kelembagaan yang akan dilakukan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Reorganisasi BPS Modern yang *right sizing* berdasarkan perubahan proses bisnis mengacu pada SBFA dan EA;
2. Penguatan UU Statistik No 16 tahun 1997 dan rancangan aturan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan
3. Meningkatkan peran BPS sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola statistik nasional.

Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan lingkungan kerja ke depan, yaitu:

1. Desain Organisasi
   Pada tahapan awal akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS saat ini. Evaluasi terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi, penilaian terhadap kerangka tatakelola institusi dan tatakelola struktur organisasi. Hasil evaluasi menjadi landasan pengembangan Model Organisasi yang berdasarkan SBFA dan EA untuk menentukan Kerangka Struktur Organisasi BPS.
2. Penguatan hukum dan peraturan perudang-undangan
   Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS di masa depan yang merubah dari *silo oriented* menjadi *functional oriented* menyebabkan BPS harus melakukan penyesuaian organisasi. Perubahan bisnis yang dilakukan juga akan lebih efektif dan efisien bila disertai penguatan hukum dan perundang-udangan yang memayungi perubahan ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:
   a. Melakukan Amandemen UU No. 16 Tahun 1997;
   b. Menyusun berbagai regulasi statistik untuk mendukung aktivitas bisnis BPS di masa depan;
   c. Merancang regulasi penguatan organisasi dalam SSN (*); dan
   d. Merancang mekanisme komunikasi yang efektif tentang hukum dan regulasi statistik kepada stakeholder dan responden BPS.

3.4.3. Kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Sebagai dampak dari perubahan proses bisnis yang dilakukan dan pembangunan system dan aplikasi agar lebih efektif dan efisien, maka pengembangan sumberdaya manusia

(SDM) BPS juga menjadi target Program Statcap-CERDAS. Isu strategis SDM BPS saat ini adalah:

1. Arah Strategis dan peran kebijakan SDM kurang memadai untuk mendukung manajemen SDM yang kuat di BPS;
2. Terbatasnya *tools* dan infrastruktur untuk mendukung fungsi manajemen SDM;
3. Belum terintegrasinya fungsi manajemen administrasi kepegawaian Internal BPS (Pusat, Pusdiklat , STIS) dan institusi lain (BKN, Menpan dll);
4. Belum terintegrasinya fungsi strategis manajemen SDM antara BPS, STIS, dan Pusdiklat; dan
5. Adanya gap kompetensi antara SDM Pusat dan daerah.

Berdasarkan isu tersebut, tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam aktivitas Statcap CERDAS, adalah:

1. Menempatkan SDM BPS sebagai penggerak (*driver*) transformasi;
2. Membangun kebijakan dan prosedur kepegawaian yang terintegrasi dengan proses bisnis BPS;
3. Penguatan struktur organisasi SDM dalam pengelolaan dan koordinasi yang lebih baik; dan
4. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (CBHRM).

Adapun cakupan yang dilakukan dalam transformasi SDM BPS ini adalah:

1. Perencanaan dan Peningkatan SDM
   Berbagai reviu dan analaisis dilakukan antara lain reviu fungsi dan peran Biro Kepegawaian, reviu Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang digunakan saat ini, analisis jabatan, analisis bebean kerja dan evaluasi jabatan termasuk rumpun jabatan (*job family*), pengembangan job grading dan kompetensi serta melakukan perencanaan pegawai berdasarkan struktur organisasi yang baru.
2. Peningkatan Kebijakan dan prosedur SDM
   Pada kegiatan ini fokus terhadap (i) rekruitmen, seleksi dan *assessment*; (ii) manajemen kinerja; dan (iii) manajemen karir.
3. Peningkatan pengembangan SDM:
   Pengembangan SDM dimulai dari pendidikan para calon pegawai di STIS sampai dengan peningkatan kompetensi melalui training yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS. Aktivitas yang dilakukan antara lain:
   a. Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum di STIS;
   b. Melakukan review terhadap pelatihan yang telah dilakukan;
   c. Mengembangkan kurikulum dan katalog diklat;
   d. Melakukan analisis kebutuhan diklat;
   e. Membuat perencanaan pengembangan pegawai;

f. Mengembangkan metode dan alat evaluasi pengembangan pegawai;
g. Mengembangkan material dan sistem *e-Training*; dan
h. Memonitor implementasi pengembangan SDM.

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

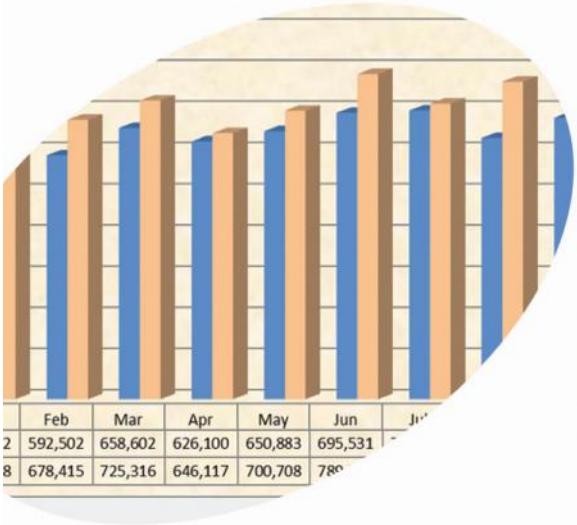

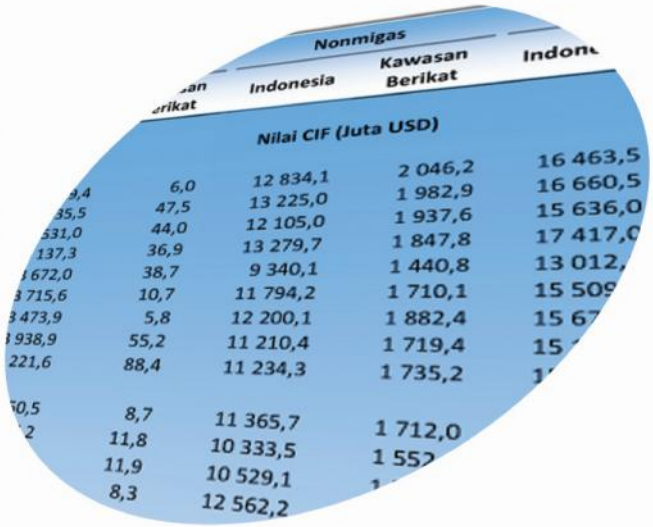

BADAN PUSAT STATISTIK

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	15
		IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	238
		IKSS 1.6. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	28
		IKSS 1.7. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	1

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*Respondent Engagement*)	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga	100 %
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha	94 %
		IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (*response* rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	88 %
	SS.3. Memastikan pengendalian mutu yang efektif dan efisien	IKSS 3.1. jumlah *self assement* aktivitas statistik mandiri yang dihimpun	13
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*User Engagement*)	IKSS 4.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	84 %
		IKSS 4.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	50 %

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		IKSS 4.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.100.000
		IKSS 4.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	78 %
		IKSS 4.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65 %
T.3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS.5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	IKSS 5.1 Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	500
	SS.6. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	IKSS 6.1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5.963

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.7. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 7.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	45 %
		IKSS 7.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	61 %
	SS.8. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 8.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	84
		IKSS 8.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	79
		IKSS 8.3. Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	100 %
	SS.9. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	IKSS 9.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 3 (tiga) program generik. Adapun keempat program yang akan dijalankan oleh BPS dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
    a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
    b. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,
    c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,
    d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik,
    e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
    f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat,
    g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,
    h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,
    i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,
    j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,
    k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi,
    l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,
    m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata,
    n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi,
    o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran,
    p. Pengembangan dan Analisis Statistik.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
    a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS),
    b. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS),
    c. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
    a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya

4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA), dengan kegiatan:
    a. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I,
    b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II,
    c. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegaitan BPS adalah sebagai berikut.

Tabel. 4-3 Matriks Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	1,880.67	1,915.91	1,621.85	713.44	1,018.76
	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	2.67	2.83	3.00	3.18	3.37
	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	8.03	8.51	9.03	9.57	10.14
	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	72.45	76.92	84.53	92.61	101.16
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	52.11	14.24	12.15	15.67	202.11
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat,	47.83	50.70	53.75	56.97	60.39
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,	14.27	6.87	7.26	43.43	8.89
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	21.14	10.62	11.25	11.93	12.64
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	1.88	2.00	2.12	2.24	2.38

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	8.09	8.58	9.10	9.64	10.22
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	318.86	158.07	106.47	44.67	51.71
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	8.87	13.78	77.99	14.38	11.20
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	5.22	5.53	5.86	6.21	6.58
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	5.60	5.94	6.30	6.67	7.08
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	5.79	6.14	6.51	6.90	7.32
	Pengembangan dan Analisis Statistik	5.97	6.32	6.69	7.08	7.49
	TOTAL PENDANAAN PROGRAM PPIS	2,459.47	2,292.96	2,023.84	1,044.60	1,521.45
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	178.47	297.92	222.21	154.33	26.51
	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	3.19	3.38	3.58	3.80	4.02

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	6.31	6.94	7.64	8.40	9.24
	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	9.00	13.00	13.00	10.00	10.60
	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	2.33	2.47	2.62	2.77	2.94
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2.37	2.51	2.67	2.83	3.00
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	32.15	35.36	38.90	42.79	47.07
	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	38.17	40.47	42.89	45.47	48.19
	TOTAL PENDANAAN PROGRAM DMPTTL	272.00	402.06	333.51	270.38	151.58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	22.29	85.08	52.20	49.74	52.23
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	364.14	243.85	287.11	316.70	292.29
	TOTAL PENDANAAAN PROGRAM PSPA	386.43	328.93	339.32	366.44	344.52

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA)	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	2.37	2.51	2.66	2.82	2.99
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	2.38	2.52	2.68	2.84	3.01
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	2.34	2.48	2.63	2.79	2.96
	TOTAL PENDANAAN PROGRAM PPAA	7.10	7.52	7.97	8.45	8.96

BAB 5

Penutup

BADAN PUSAT STATISTIK

Renstra BPS periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS tahun 2015 - 2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2015 – 2019, yakni:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Peningkatan koordinasi kegiatan statistik dalam rangka penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang bersinambung; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam Renstra BPS 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Chane and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 dan 2

Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

Lampiran 2 - Kerangka Regulasi

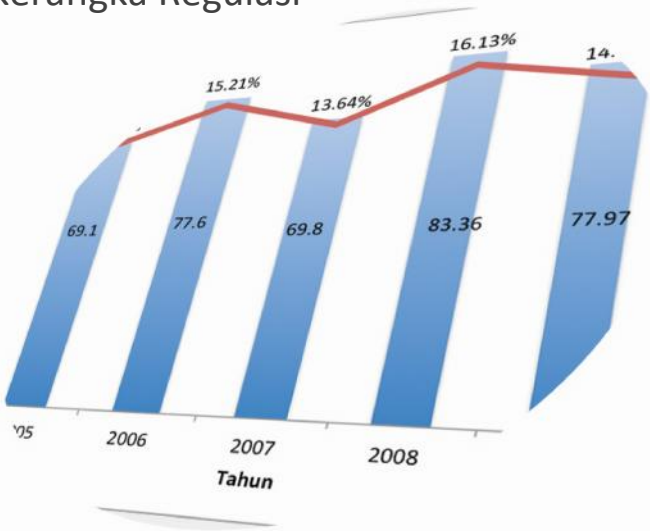

BADAN PUSAT STATISTIK

Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik							5.032,80	5.296,89	5.055,33	4.130,95	4.563,40	24.079,38
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											1. Deputi Bidang Statistik Sosial 2. Deputi Bidang Statistik Produksi 3. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 4. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik 5. Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik 6. Sekretariat Utama 7. Inspektorat Utama
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%						
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	50%	80%	80%	80%	80%						
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.4. Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	25	15	18	18	15						
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan	230	232	234	236	238						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Statistik yang terbit tepat waktu											
	1.6. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	27	28	28	28	28						
	1.7. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	37	5	53	35	1						
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	94%	98%	99%	100%	100%						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	92%	90%	93%	93%	94%						
	2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non	87%	87%	87%	87%	88%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	rumah tangga non usaha											
	SS.3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien											
	3.1. jumlah self assement aktivitas statistik mandiri yang dihimpun	5	7	9	11	13						
	SS.4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)											
	4.1. Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%						
	4.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		42 %	44 %	46 %	50 %						
	4.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	4.4. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80%	80%	80%	80%	80%						
	4.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65%	65%	65%	65%	65%						
	SS.5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN											
	5.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	150	500	500	500	500						
	SS.6. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN											
	6.1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5.320	5.533	5.672	5.815	5.963						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SS.7. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS											
	7.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	27	30	34	39	45						
	7.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	57	58	59	60	61						
	SS.8. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
	8.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	75	75	78	81	84						
	8.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	65	70	75	77	79						
	8.3. Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	60%	70%	80%	90%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SS.9. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan											
	9.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							**2.506,75**	**2.292,96**	**2.023,84**	**1.044,60**	**1.521,45**	**9.389,60**
	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**						
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%						**1. Deputi Bidang Statistik Sosial 2. Deputi Bidang Statistik Produksi 3. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 4. Deputi Bidang Neraca dan**
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	50%	80%	80%	80%	80%						
	Menyediakan data statistik yang berkualitas	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						**Analisis Statistik** **5. Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik**
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	25	15	18	18	15						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	230	232	234	236	238						
	Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu	27	28	28	28	28						
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	37	5	53	35	1						
	Tingkat kesalahan maksimal kegiatan Sensus Ekonomi 2016		5%									
	Persentase kesesuaian jumlah target perusahaan/usaha dengan realisasi SE2016		95%									
	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)	**94%**	**96%**	**97%**	**97%**	**98%**						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	94%	98%	99%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	92%	92%	93%	93%	94%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	87%	87%	87%	87%	88%						
	Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien	**5**	**7**	**9**	**11**	**13**						
	jumlah *self assement* aktivitas statistik mandiri yang dihimpun	5	7	9	11	13						
	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	**84%**	**84%**	**84%**	**84%**	**84%**						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%						
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		42 %	44 %	46 %	50 %						
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000						
	Meningkatnya kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	**70%**	**72%**	**74%**	**76%**	**78%**						
	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	70%	72%	74%	76%	78%						
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	**150**	**500**	**500**	**500**	**500**						
	Jumlah metadata kegiatan statistik	150	500	500	500	500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	sektoral dan khusus yang dihimpun											
KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)							**1.880,67**	**1.915,91**	**1.621,85**	**713,44**	**1.018,76**	**7.150,62**
	Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan survei	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**1,63**	**2,86**	**2,71**	**2,53**	**2,31**	**BPS Provinsi**
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah dokumen updating peta	510	510	510	510	510						
	Laporan Diseminasi Statistik	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**8,05**	**9,73**	**10,06**	**10,39**	**10,73**	
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Laporan Metadata Statistik	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**-**	**6,93**	**7,35**	**7,79**	**8,26**	**BPS Provinsi**
	Jumlah Laporan Metadata Statistik yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*)	95%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	survei kebutuhan data											
	Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**63,96**	**69,56**	**74,08**	**78,89**	**84,02**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/laporan Sensus Penduduk				**510**	**510**				**21,54**	**431,39**	
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk				510	510						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	yang terbit tepat waktu											
	Publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus	**510**	**33**				**276,09**	**1,48**				
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	510	33									
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Penduduk Antar Sensus	95%										
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**89,76**	**97,16**	**103,61**	**110,49**	**117,83**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**2,23**	**3,51**	**3,40**	**3,27**	**3,10**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa			**510**	**510**				**0,30**	**84,23**		
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu			510	510							
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Pendataan Potensi Desa				95%							
	Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial	**510**					**1.089,99**					
	Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	510										
	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan,	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**75,82**	**82,25**	**87,65**	**93,42**	**99,56**	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Hortikultura, dan Perkebunan											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga	96%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	96%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Perkebunan dengan pendekatan usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	96%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**5,22**	**6,71**	**6,83**	**6,93**	**7,02**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Statistik Industri,	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**41,46**	**45,49**	**48,32**	**51,33**	**54,52**	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**10,32**	**7,93**	**8,18**	**8,42**	**8,66**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	510	510	510	510	510						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**-**	**4,23**	**4,48**	**4,75**	**5,04**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan	510	510	510	510	510						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan yang memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016	**510**	**510**	**510**	**510**		**65,34**	**1.383,88**	**894,35**	**4,67**	**-**	
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	510	510	510	510							
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016			100%								
	Publikasi/Laporan Statistik Harga	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**42,79**	**46,91**	**49,84**	**52,96**	**56,27**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga	510	510	510	510	510						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	yang memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup		**90**	**90**	**90**			**29,88**	**147,76**	**44,05**		
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup yang terbit tepat waktu		90	90	90							
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Biaya Hidup		100%	100%								
	Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)	**375**	**375**	**375**	**375**		**3,00**	**8,98**	**56,68**	**4,83**		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu	375	375	375	375							
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)			85%								
	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**28,13**	**31,22**	**33,05**	**34,99**	**37,04**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate)	95%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**20,05**	**22,57**	**23,80**	**25,09**	**26,45**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca	95%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	produksi dengan pendekatan usaha											
	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**13,81**	**15,90**	**16,66**	**17,45**	**18,28**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen	95%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	(response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha											
	Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**	**43,01**	**47,14**	**50,08**	**53,22**	**56,55**	
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu	510	510	510	510	510						
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	510	510	510	510	510						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan	95%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha											
KEGIATAN 2896: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan analisis statistik)							**5,97**	**6,32**	**6,69**	**7,08**	**7,49**	**33,54**
	Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**5,16**	**5,47**	**5,80**	**6,15**	**6,51**	**Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik**
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu	24	24	24	24	24						
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	21	21	21	21	21						
	Jumlah laporan aktivitas statistik yang dilakukan self asessment	5	7	9	11	13						
	jumlah self assement aktivitas	5	7	9	11	13						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	statistik mandiri yang dihimpun											
	Jumlah model statistik sosial dan ekonomi	2	2	2	2	2						
	Jumlah Release data Analisis dan Pengembangan Statistik yang tepat waktu	5	5	5	5	5						
	Publikasi/laporan Indeks Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Gender yang terbit tepat waktu	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0,81**	**0,85**	**0,89**	**0,93**	**0,98**	
	Indeks Kesetaraan Gender (IKG)	1	1	1	1	1						
	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 2897:Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)							**8,03**	**8,51**	**9,03**	**9,57**	**10,14**	**45,28**
	Sistem Metadata yang Dikembangkan	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**0,57**	**0,6**	**0,64**	**0,67**	**Direktorat Diseminasi Statistik**
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar yang dihimpun	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	150	500	500	500	500						
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	250	250	250	250	250						
	Jumlah dokumen SKD yang dihimpun	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	Sistem pendukung layanan untuk diseminasi data dan informasi statistik yang dikembangkan dan dipelihara	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**8,03**	**7,94**	**8,43**	**8,93**	**9,47**	**Direktorat Diseminasi Statistik**
	Jumlah Publikasi yang terbit tepat waktu	2	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN	2	3	3	3	3						
	jumlah pemenuhan layanan permintaan ISSN dan ISBN	175	175	175	175	175						
	Jumlah aktivitas layanan langsung	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	terhadap konsumen											
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%						
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000						
	Jumlah satker yang memiliki website yang terhubung secara online	513	513	513	513	513						
KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)							**5,79**	**6,14**	**6,51**	**6,90**	**7,32**	**32,66**
	Publikasi/laporan statistik neraca pengeluaran nasional dan regional yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang ekonomi	**19**	**20**	**19**	**19**	**20**	**5,79**	**6,14**	**6,51**	**6,90**	**7,32**	**Direktorat Statistik Neraca Produksi**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	19	20	19	19	20						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	8	9	9	9	10						
	Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	5%	5%	5%	5%	5%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	85 %	86%	86%	87%	87%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	85%	85%	85%	86%	86%						
	Persentase pemasukan	80%	81%	81%	82%	82%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha											
KEGIATAN 2899: Direktorat Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi)							**5,60**	**5,94**	**6,30**	**6,67**	**7,08**	**31,59**
	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	**21**	**19**	**17**	**18**	**17**	**5,60**	**5,94**	**6,30**	**6,67**	**7,08**	**Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran**
	Jumlah Kajian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan	54	55	56	57	58						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	21	19	17	18	17						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	9	8	6	7	6						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	95%	95%	95%	95%	95%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB Lapangan Usaha	5%	5%	5%	5%	5%						
KEGIATAN 2900:Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)							**2,67**	**2,83**	**3,00**	**3,18**	**3,37**	**15,07**
	Dokumen, Laporan, dan publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan survei	**12**	**12**	**12**	**13**	**14**	**2,67**	**2,83**	**3,00**	**3,18**	**3,37**	**Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei**
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei yang mutakhir	3	3	3	3	3						
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	5	5	5	6	6						
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase data IBR yang terupdate		100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara	3	3	3	3	3						
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir	1	1	1	1	1						
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	2.074	3.000	3.000	3.000	935.000						
KEGIATAN 2901:Direktorat Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)							**119,73**	**76,92**	**84,53**	**92,61**	**101,16**	**474,95**
	Sistem informasi/aplikasi pengolahan yang dibuat/dikembangkan/dipelihara	**34**	**29**	**30**	**29**	**29**	**119,73**	**76,92**	**84,53**	**92,61**	**101,16**	**Direktorat Sistem Informasi Statistik**
	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke	95%	96%	97%	98%	99%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	BPS pusat tepat waktu											
	Persentase uptime layanan jaringan komunikasi	99%	99%	99%	99%	99%						
	Jumlah Dokumen Statcap Cerdas Bidang TI yang terbit tepat waktu	7	7	5	3	3						
	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir	5%	25%	75%	100%	100%						
	Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan *service level agreement*	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah penambahan koleksi data yang dihimpun	20	20	20	20	20						
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3	2	2	2	2						
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)							**318,86**	**158,07**	**106,47**	**44,67**	**51,71**	**679,79**
	Publikasi/laporan statistik distribusi yang terbit tepat waktu	**37**	**40**	**42**	**42**	**42**	**8,09**	**8,57**	**9,09**	**9,63**	**10,21**	**Direktorat Statistik Distribusi**
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	37	40	42	43	43						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ ISBN	29	34	36	37	37						
	Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	23	24	24	24	24						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	87%	92%	97%	97%	97%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	80%	85%	94%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016	**12**	**1**	**53**	**34**		**310,78**	**140,28**	**75,89**	**5,54**		
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	12	5	53	34							
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 yang memiliki ISSN/ISBN	12	5	53	34							
	Tingkat kesalahan maksimal kegiatan Sensus Ekonomi 2016		5%									
	Persentase kesesuaian jumlah target perusahaan/usaha dengan realisasi SE2016		95%									
	Persentase pemasukan dokumen			93%								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	(response rate) Sensus Ekonomi 2016											
	Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Perdagangan Antar Wilayah Komoditi Tertentu		**1**	**1**	**1**	**1**		**5,72**	**15,00**	**21,00**	**30,00**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Perdagangan Antar Wilayah Komoditi Tertentu yang tepat waktu		2	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Perdagangan Antar Wilayah Komoditi Tertentu yang memiliki ISSN/ISBN		2	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha		100%	100%	100%	100%						
	Publikasi/Laporan Updating Direktori		**1**	**1**	**1**	**1**		**3,50**	**6,50**	**8,50**	**11,50**	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pasar dan Pusat Perdagangan											
	Jumlah Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan yang tepat waktu		1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan yang memiliki ISSN/ISBN			1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha			100%	100%	100%						
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)							**8,87**	**13,78**	**77,99**	**14,38**	**11,20**	**126,21**
	Publikasi/Laporan Statistik Harga	**39**	**43**	**31**	**25**	**25**	**7,98**	**9,40**	**9,97**	**10,56**	**11,20**	**Direktorat Statistik Harga**
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi				2							
	Jumlah Publikasi/Laporan	38	40	28	22	22						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Statistik Harga yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	35	37	25	19	19						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	95%	96%	97%	97%	98%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	98	99	99	99	99						
	Jumlah Release data Statistik Harga yang tepat waktu	27	27	27	28	27						
	Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup (SBH)		**1**	**1**	**2**			**1,88**	**19,40**	**2,95**		
	Jumlah Publikasi/Laporan SBH yang terbit tepat waktu		1	1	2							
	Jumlah Publikasi/Laporan		1	1	2							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	SBH yang memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga		100%	100%								
	Publikasi/Laporan survei penyempurnaan diagram timbang Nilai Tukar Petani	**1**	**1**	**1**	**6**		**0,88**	**2,50**	**48,62**	**0,87**		
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei penyempurnaan Diagram Timbang yang terbit tepat waktu	1	1	1	6							
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang yang memiliki ISSN/ISBN				6							
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga			100%								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)							**8,09**	**8,58**	**9,10**	**9,64**	**10,22**	**45,63**
	Publikasi/laporan statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**8,09**	**8,58**	**9,10**	**9,64**	**10,22**	**Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi**
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	31	31	31	31	31						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang memiliki ISSN/ISBN	30	30	30	30	30						
	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Persentase pemasukan	94%	94%	95%	95%	95%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen (response rate) survey dengan pendekatan usaha											
KEGIATAN 2905 : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)							**52,11**	**14,24**	**12,15**	**15,67**	**202,11**	**296,28**
	Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	**17**	**45**	**12**	**10**	**45**	**6,36**	**6,74**	**7,15**	**7,70**	**8,30**	**Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan**
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	5	2	4	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	17	45	12	9	44						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	16	45	12	8	44						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	yang memiliki ISSN/ISBN											
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	4	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah indikator fertilitas dan mortalitas yang dihasilkan			2	2	2						
	Publikasi/Laporan survei Penduduk Antar Sensus	**1**	**2**	**1**			**45,75**	**7,50**	**5,00**	**-**	**-**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	1	1									
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang memiliki ISSN/ISBN	**1**	**1**	**1**								
	Persentase pemasukan	95%										

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus											
	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk				**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**7,97**	**193,81**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu				1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk yang memiliki ISSN/ISBN											
KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)							**47,83**	**50,70**	**53,75**	**56,97**	**60,39**	**269,65**
	Publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang terbit tepat waktu	**21**	**19**	**21**	**20**	**20**	**47,83**	**50,70**	**53,75**	**56,97**	**60,39**	**Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat**
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	2	3	1	2	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	21	19	21	20	20						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	21	22	23	22	22						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	98%	98%	98%	98%	98%						
	Jumlah indikator kesehatan penduduk yang dihasilkan			18	18	18						
	Jumlah publikasi/laporan statistik kesehatan yang terbit tepat waktu			1	1	1						
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)							**14,27**	**6,87**	**7,26**	**43,43**	**8,89**	**80,72**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	**14**	**12**	**13**	**12**	**13**	**3,03**	**6,23**	**6,60**	**7,00**	**7,42**	**Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	3	1	3	2	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	14	12	13	12	13						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	10	9	9	9	10						
	Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pendekatan non rumah tangga non usaha											
	Metode Pengukuran Data Kemiskinan yang disempurnakan	**1**	**1**				**0,33**	**0,64**	**0,66**	**0,66**	**0,71**	
	Persentase terbangunnya metode kemiskinan yang mutakhir	100%	100%									
	Publikasi/Laporan Pendataan Podes				**37**	**1**				**35,77**	**0,76**	
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Podes yang terbit tepat waktu				37	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Podes yang memiliki ISSN/ISBN				37							
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Podes				100%							
	Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial	**1**					**10,91**					
	Persentase basis data Terpadu Program	100%										

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu											
KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)							**5,22**	**5,53**	**5,86**	**6,21**	**6,58**	**29,40**
	Publikasi/laporan statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	**20**	**21**	**22**	**22**	**22**	**5,22**	**5,53**	**5,86**	**6,21**	**6,58**	**Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata**
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	1	1	1	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	20	21	22	22	22						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	20	20	22	22	22						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	85%	87%	87%	88%	89%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	90%	91%	91%	91%	92%						
	Jumlah Release data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu	23	23	23	23	23						
KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)							**1,88**	**2,00**	**2,12**	**2,24**	**2,38**	**10,62**
	Publikasi/laporan statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	**15**	**15**	**17**	**16**	**16**	**1,88**	**2,00**	**2,12**	**2,24**	**2,38**	**Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan**
	Jumlah aktivitas statistik yang	1	1	3	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	mempublikasikan nilai akurasi											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	15	15	17	16	16						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	12	12	14	13	13						
	Jumlah Release data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang tepat waktu			1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate)	90%	90%	90%	91%	92%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	survei dengan pendekatan usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	85%	85%	86%	86%	87%						
KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan)							**21,14**	**10,62**	**11,25**	**11,93**	**12,64**	**67,57**
	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	**20**	**22**	**21**	**20**	**21**	**10,01**	**10,62**	**11,25**	**11,93**	**12,64**	**Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan**
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	11	5	4	3	4						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	20	22	21	20	21						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN /ISBN	16	16	15	16	17						
	Jumlah Release data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	84%	88%	88%	89%	89%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	80%	82%	82%	85%	85%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	87%	91%	91%	91%	92%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian 2013	25					**11,12**					
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian 2013 yang tepat waktu	25										
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian 2013 yang memiliki ISSN/ISBN	23										
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS							**2.132,53**	**2.667,47**	**2.684,20**	**2.711,46**	**2.688,47**	**12.884,14**
	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	**65**	**70**	**75**	**77**	**79**						**Sekretariat Utama**
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	75	75	78	81	84						
	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	65	70	75	77	79						
	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pelaksanaan kegiatan											
	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	**57%**	**58%**	**59%**	**60%**	**61%**						
	Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5320	5533	5672	5815	5963						
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	27%	30%	34%	39%	45%						
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	97%	98%	98%	99%	99%						
	Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	180	182	184	186	188						
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	57%	58%	59%	60%	61%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**						
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75%	75%	75%	75%	75%						
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	95%	95%	95%	95%	95%						
	Meningkatnya Layanan Perkantoran		**65%**	**67%**	**69%**	**71%**						
	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan		65%	67%	69%	71%						
KEGIATAN 2881 : Biro Bina Program (Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran)							**178,47**	**297,92**	**222,21**	**154,33**	**26,51**	**879,45**
	Dokumen/Laporan Perencanaan,	**529**	**529**	**529**	**529**	**529**	**177,91**	**297,33**	**221,58**	**153,66**	**25,81**	**Biro Bina Program**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Penganggaran dan Reformasi Birokrasi											
	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan reformasi birokrasi yang terbit tepat waktu	529	529	529	529	529						
	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja BPS	90	90	90	90	90						
	Persentase realisasi anggaran terhadap PAGU	95%	95%	95%	95%	95%						
	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	65	70	75	77	79						
	Laporan Monitoring dan Evaluasi	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0,56**	**0,59**	**0,63**	**0,67**	**0,71**	
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	75	75	78	81	84						
	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi yang terbit tepat waktu	17	17	17	17	17						
KEGIATAN 2882: Biro Humas dan Hukum (Pelayanan Publik,							**9,00**	**13,00**	**13,00**	**10,00**	**10,60**	**55,62**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Hubungan Masyarakat dan Hukum)												
	Laporan Kehumasan, hukum, dan hubungan kelembagaan	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**9,00**	**13,00**	**13,00**	**10,00**	**10,60**	**Biro Humas dan Hukum**
	Laporan Kehumasan, hubungan kelembagaan, dan hukum yang tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	70%	74%	77%	81%						
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah kegiatan Press release data BPS yang diselenggarakan	27	27	27	27	27						
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75%	75%	75%	75%	75%						
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah penerbitan majalah internal	12	12	12	12	12						
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	95%	95%	95%	95%	95%						
	Persentase Terselesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan	95%	95%	95%	95%	95%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.											
KEGIATAN 2883: Biro Kepegawaian (Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian)							**6,31**	**6,94**	**7,64**	**8,40**	**9,24**	**38,54**
	Laporan Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**6,31**	**6,94**	**7,64**	**8,40**	**9,24**	**Biro Kepegawaian**
	Laporan Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian yang tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Persentase data mutasi kepegawaian yang di update	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Penyelesaian usulan Kartu Pegawai, Karis, dan Karsu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase usulan mutasi pegawai yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pegawai yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	50%	55%	60%	65%	70%						
	Jumlah pejabat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan (*medical check up*)	316	316	340	380	410						
	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang ditetapkan	4	4	3	2	2						
	Persentase usulan penerbitan SK Tugas Belajar dan SK aktif kembali yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase usulan mutasi pejabat fungsional tertentu yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	27%	30%	34%	39%	45%						
	Jumlah Fungsional Statistisi pada	4.000	4.200	4.326	4.456	4.590						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Kementerian/Lembaga											
	Jumlah Fungsional pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	1.320	1.333	1.346	1.359	1.373						
	Laporan Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**6,31**	**6,94**	**7,64**	**8,40**	**9,24**	**Biro Kepegawaian**
	Laporan Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian yang tepat waktu	4	4	4	4	4						
KEGIATAN 2884: Biro Keuangan (Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan)							**153,71**	**188,11**	**194,15**	**200,56**	**207,36**	**943,90**
	Laporan Keuangan	**7.863**	**7.863**	**7.863**	**7.863**	**7.863**	**3,19**	**3,38**	**3,58**	**3,80**	**4,02**	**Biro Keuangan**
	Jumlah dukungan manajemen yang terbit tepat waktu	7.863	7.863	7.863	7.863	7.863						
	Persentase TGR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Surat Permintaan Pembayaran yang	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	menjadi Surat Perintah Membayar											
	Persentase SPM yang menjadi SP2D	89%	91%	93%	94%	96%						
	Persentase SPM yang terbit sesuai standar Peraturan Menteri Keuangan	89%	91%	93%	94%	96%						
	Persentase SP2D yang dientry kedalam aplikasi SPM	90%	91%	93%	94%	96%						
	Persentase satker yang mengirimkan data e-audit bulanan yang tepat waktu	60%	60%	60%	60%	60%						
	Tingkat akurasi data realisasi keuangan setelah dua bulan tahun anggaran berakhir (LK audited dg un-audited)	95%	95%	95%	95%	95%						
	Layanan Perkantoran	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**150,52**	**184,73**	**190,57**	**196,77**	**203,34**	**Biro Keuangan**
	Persentase pembayaran upah dan Gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
KEGIATAN 2885: Biro Umum (Dukungan Manajemen BPS Lainnya)							**47,37**	**100,34**	**106,36**	**112,74**	**119,50**	**486,31**
	Laporan Pelayanan Umum Kerumah tanggaan dan Perlengkapan	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**2,33**	**2,47**	**2,62**	**2,77**	**2,94**	**Biro Umum**
	Jumlah Satker yang menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	513	513	513	513	513						
	Persentase usul Penetapan Status Penggunaan yang telah diajukan ke DJKN	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Permohonan Penetapan Status Penggunaan yang telah diterbitkan SK-nya	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase usulan penghapusan barang yang telah diterbitkan SK-nya	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase jumlah Surat Permintaan Mencetak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan		65%	67%	69%	71%						
	Persentase penerimaan hibah barang langsung yang telah diajukan permohonan register dan pengesahannya ke DJPU	100%	100%	100%	100%	100%						
	Layanan Perkantoran	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**45,05**	**97,87**	**103,74**	**109,97**	**116,56**	**Biro Umum**
	Persentase Sarana Prasaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kondisi baik	85%	85%	86%	87%	88%						
	Persentase Sarana dan prasarana lainnya dalam Kondisi baik	85%	85%	86%	87%	88%						
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan							**1.640,30**	**1.953,83**	**2.026,29**	**2.103,09**	**2.184,51**	**9.908,02**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)												
	Laporan Dukungan Manajemen Lainnya	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**1.640,30**	**1.953,83**	**2.026,29**	**2.103,09**	**2.184,51**	**BPS Provinsi**
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	3	3	3	3	3						
	Layanan Perkantoran	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**1.640,30**	**1.953,83**	**2.026,29**	**2.103,09**	**2.184,51**	**BPS Provinsi**
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi Baik	80%	85%	90%	95%	97%						
	Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	80%	85%	90%	95%	97%						
KEGIATAN 2887: Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) (Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)							**43,27**	**48,31**	**52,38**	**56,84**	**61,72**	**262,51**
	Peserta Pendidkan dan Pelatihan	**33**	**23**	**22**	**22**	**22**	**32,15**	**35,36**	**38,90**	**42,79**	**47,07**	**Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)**
	Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan	90%	91%	92%	93%	94%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	kategori memuaskan											
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	91%	92%	93%	94%						
	Persentase Kepuasan Peseta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	90%	92%	94%	95%	96%						
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Layanan Perkantoran	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**11,12**	**12,95**	**13,48**	**14,05**	**14,65**	**Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)**
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kondisi baik	90%	91%	92%	93%	95%						
	Persentase Sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik	90%	91%	92%	93%	95%						
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Laporan dukungan manejemen	5	5	5	5	5						
KEGIATAN 2888: STIS (Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik /STIS)							**54,08**	**59,02**	**62,16**	**65,49**	**69,02**	**309,79**
	Mahasiswa STIS yang berkualitas dan unggul	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**38,17**	**40,47**	**42,89**	**45,47**	**48,19**	**STIS**
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	97%	98%	98%	99%	99%						
	Persentase dosen yang melakukan penelitian	80%	80%	85%	85%	90%						
	Jumlah pengabdian kepada masyarakat	10	12	15	20	20						
	Layanan Perkantoran	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**15,91**	**18,56**	**19,27**	**20,03**	**20,83**	**STIS**
	Jumlah Laporan dukungan manajemen	4	4	4	4	4						
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi	95%	95%	95%	95%	95%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Informasi dan Komunikasi dalam kondisi baik											
	Persentase Sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik	95%	95%	95%	95%	95%						
PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							**386,43**	**328,93**	**339,32**	**366,44**	**344,52**	**1.765,64**
	Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						**Sekretariat Utama**
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65%	65%	65%	65%	65%						
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
KEGIATAN 2890: Biro Umum, STIS, dan Pusdiklat (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							**22,29**	**85,08**	**52,20**	**49,74**	**52,23**	**261,55**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya)												
	Kendaraan Bermotor		**8**	**21**	**21**	**21**		**0,56**	**6,25**	**6,25**	**6,25**	**Biro Umum, STIS, dan Pusdiklat**
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan		100%	100%	100%	100%						
	Perangkat pengolah data dan komunikasi	**3.884**	**4.881**	**1.013**	**953**	**898**	**7,59**	**74,47**	**10,98**	**9,74**	**9,95**	
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Peralatan dan fasilitas	**143**	**350**	**859**	**1.116**	**1.164**	**9,89**	**7,40**	**15,64**	**20,32**	**21,19**	
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Gedung/bangunan	**3.676**	**417**	**2.295**	**3.490**	**3.852**	**4,81**	**2,65**	**19,34**	**13,42**	**14,84**	
	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
KEGIATAN 2891: Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)							**364,14**	**243,85**	**287,11**	**316,70**	**292,29**	**1.504,10**
	Kendaraan Bermotor	**715**	**390**	**394**	**334**	**374**	**13,75**	**23,41**	**16,23**	**10,25**	**11,14**	**BPS Provinsi**
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Perangkat pengolah data dan komunikasi	**1.226**	**11.979**	**2.924**	**2.843**	**2.123**	**6,78**	**72,43**	**21,38**	**23,70**	**20,65**	
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Peralatan dan fasilitas perkantoran	**22.322**	**33.353**	**8.541**	**7.189**	**5.528**	**58,46**	**63,44**	**21,33**	**21,98**	**24,91**	
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Gedung/bangunan	**210.249**	**71.589**	**186.199**	**153.382**	**134.631**	**285,16**	**84,56**	**228,17**	**260,77**	**235,60**	
	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan											
PROGRAM 03 : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS							**7,10**	**7,52**	**7,97**	**8,45**	**8,96**	**40,00**
	Meningkatnya Ketaatan Satker dalam akuntabilitas keuangan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						**Inspektorat Utama**
	Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti *)	90%	95%	100%	100%	100%						
	Persentase satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA (dari satker yang diperiksa)	90%	92%	94%	96%	100%						
	Persentase satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP (dari satker yang diperiksa)	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya											
	Meningkatnya Ketaatan Satker dalam akuntabilitas kinerja	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**	**100%**						
	Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	60%	70%	80%	90%	100%						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	8	6	6	6	6						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI) *)	4	12	18	24	30						
KEGIATAN 2892 : Inspektorat Wilayah I (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I)							**2,37**	**2,51**	**2,66**	**2,82**	**2,99**	**13,36**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Laporan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah I	48	50	52	54	56	**2,37**	**2,51**	**2,66**	**2,82**	**2,99**	**Inspektorat Wilayah I**
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	44	46	49	52	56						
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	12	12	12	12	12						
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	7	8	9	10	12						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	2	2	2	2	2						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI) *)	2	4	6	8	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	12	12	12	12	12						
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan	5	10	15	20	20						
KEGIATAN 2893 : Inspektorat Wilayah II (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II)							**2,38**	**2,52**	**2,68**	**2,84**	**3,01**	**13,42**
	Laporan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah II	48	50	52	54	56	**2,38**	**2,52**	**2,68**	**2,84**	**3,01**	**Inspektorat Wilayah II**
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	44	46	49	52	56						
	Jumlah satker yang telah menyusun	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Laporan Keuangan sesuai dengan SAP											
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	7	8	9	10	12						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	4	2	2	2	2						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI) *)	0	4	6	8	10						
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	12	12	12	12	12						
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan	5	10	15	20	20						
KEGIATAN 2894 : Inspektorat Wilayah III (Pengawasan dan							**2,34**	**2,48**	**2,63**	**2,79**	**2,96**	**13,21**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III)												
	Laporan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah III	48	50	52	54	56	**2,34**	**2,48**	**2,63**	**2,79**	**2,96**	**Inspektorat Wilayah III**
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	44	46	49	52	56						
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	12	12	12	12	12						
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	7	8	9	10	12						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	2	2	2	2	2						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI) *)	2	4	6	8	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	12	12	12	12	12						
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan	5	10	15	18	18						

Lampiran 2 - Kerangka Regulasi

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Amandemen UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik	• **Untuk mencegah instansi pemerintah melakukan duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya.** Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS. • **Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda,yang pada gilirannya**	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM, DPR	Tahun 2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan. Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak menjalankan ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan.			

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2015-2019

PELOPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA UNTUK SEMUA

Badan Pusat Statistik Indonesia (Statistics Indonesia).
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,
Faks (62-21) 3857046,
Mailbox : bpshq@bps.go.id

Hak Cipta © 2015 Badan Pusat Statistik
Semua Hak Dilindungi